

Perempuan Terbelenggu dalam Kemiskinan



Oleh. A.A. Rai Kartini

Abstrak

Efforts to eradicate poverty will not work maximally if women have not been able to enjoyfull social, cultural, economic and political rights. For this purpose, three strategic interventions, namely education, reproductive health and economic opportunities for women and equally important, are the elimination of violence against women. There are several arguments presented to support the importance of focusing on gender issues in poverty: Women are poorer and deprived than man. Therefore a gender focus is needed for the reason of equity (gender equity). Stating that while women are just as poor as men, there is no need for special treatment so that investments in the social sector directed at women can be justified if the social rate of return on investment is higher if given to men. When women are allowed to work in the professions they want, when they have access to financial services, and when they are protected by law from rigid violence, they are not only more economically empowered but also long-lived

Kata Kunci : Perempuan dan Kemiskinan

Sejak dulu, penghormatan terhadap perempuan merupakan sebuah keniscayaan, dan dewasa ini sosok perempuan masih terdiskriminasi dari sosok laki-laki. Walaupun sedikit ada kemajuan dari kondisi masa lampau namun sosok perempuan masih berada dalam garis kemiskinan, hal ini karena adanya kesenjangan ekonomi perempuan. Banyak perempuan yang tidak mendapatkan pekerjaan yang layak karena faktor pendidikan, rendahnya pendidikan perempuan khususnya di daerah pinggiran akibat budaya, seperti budaya Patriarkhi yang mengutamakan anak laki-laki, proses marginalisasi (peminggiran dalam bidang ekonomi) yang mengakibatkan kemiskinan, banyak terjadi dalam masyarakat khususnya di negara berkembang seperti pengusuran dari kampung halaman, eksploitasi.

Disadari atau tidak, di tengah masyarakat terjadi kesenjangan gender, yang bahkan tidak disadari oleh kaum perempuan sendiri. Kesenjangan itu tampak dalam berbagai bentuk minimnya partisipasi dan akses kaum perempuan dalam proses pembangunan selama ini.

Akibatnya, banyak program pembangunan yang substansinya belum memperlihatkan kesetaraan dan keadilan gender. Namun pemiskinan atas perempuan maupun laki - laki yang disebabkan jenis kelamin merupakan salah satu bentuk ketidakadilan yang disebabkan gender.

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Masalah kemiskinan merupakan akar yang memiliki dampak sangat luas terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak seperti perdagangan perempuan dan anak, penurunan derajat kesehatan dan drop out pendidikan.

Terminologi perempuan berasal dari kata mpu sejenis predikat orang suci dalam Hindu. Ada 100 negara diseluruh dunia yang melarang seorang perempuan bekerja hanya karena dia seorang perempuan. Setidaknya di 150 negara ada atau peraturan yang sifatnya diskriminatif terhadap perempuan. Isu perempuan muncul dikarenakan adanya budaya patriarki. *Oxford Advanced Learner's Dictionary* menyebutkan bahwa patriarki adalah *asociety, a system, or a country that is ruled or controlled by men* (2000).

Setiap kekuasaan dalam masyarakat yang menganut sistem patriarki dikontrol oleh laki-laki. perempuan memang berbeda, namun sekaligus juga sama dengan laki-laki. Ada kondisi umum yang membuat perempuan sama dengan laki-laki, namun ada juga kondisi khusus yang dimiliki perempuan yang membuat berbeda, tapi bukan berarti untuk dibedakan. Perbedaan dengan cara menilai positif adalah perbedaan yang melihat perempuan dengan nilai dan cara beradanya yang berbeda dengan laki-laki. Nilai dan cara berada perempuan dikonstruksikan dan dikondisikan oleh pengalaman-pengalaman perempuan yang melahirkan, menyusui, merawat dan mempunyai tingkat kesensitifitasan serta kepedulian yang besar. Nilai-nilai perempuan didasarkan pada etika kepedulian yang kental melekat dalam sistem cara pandang dunia perempuan. Sedangkan perbedaan cara menilai negatif adalah melihat nilai-nilai perempuan sebagai yang lain (*other*)

2. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan terhadap perempuan menyangkut di semua lini kehidupan, antara lain bagaimana HAM perempuan dalam keluarga, Perempuan tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, Budaya yang melekat dalam kehidupan bermasyarakat membawa

dampak posisi perempuan sangat rentan dan belum lagi banyak perempuan yang masih menjadi budak nafsu. Kartini – kartini Indonesia belum mendapat tempat di hatinya sendiri dan di hati masyarakat . Oleh karena itu, strategi nasional dan lokal yang diimplementasikan bagi penurunan angka kemiskinan harus bisa mendorong peningkatan partisipasi dan kesejahteraan perempuan. Untuk itulah perlu kajian yang mendalam bagaimana kita bisa mengentaskan kemiskinan perempuan.

B. PEMBAHASAN

Persoalan ketimpangan gender terdapat dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, mulai dari struktur sosial, politik, ekonomi, kultur masyarakat, sampai pada produk kebijakan yang dilahirkan. Setidaknya terdapat 9 aspek yang menunjukkan perempuan begitu dekat dengan kemiskinan, dikarenakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan (Noerdin, 2006 dalam Iwan, 2010)

Ellis dalam Suharto (2006), dalam Nugroho, 2008 mengatakan bahwa “dimensi kemiskinan menyangkut aspek ekonomi, politik dan sosial-psikologis”. Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumber daya dalam konteks ekonomi tidak hanya menyangkut aspek finansial tetapi meliputi semua jenis kekayaan (*wealth*) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Secara politik, kemiskinan dilihat dari rendahnya akses terhadap kekuasaan. Pengertian kekuasaan dalam konteks ini mencakup tatanan sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumber daya (Suharto, 2006, dalam Nugroho 2008)

Jumlah perempuan yang cukup banyak (126,8 juta jiwa dari total jumlah penduduk Indonesia mencapai 254,9 juta jiwa di Indonesia dari Badan Pusat Statistik) ini dianggap memiliki potensi lebih dalam mengentaskan kemiskinan yang melanda negeri ini terutama untuk meningkatkan kesejahteraan kaum perempuan sendiri. Di Indonesia ada beberapa hal focus yang menjadi permasalahan terhadap perempuan :

- HAM dalam Keluarga, alasan yang sering digunakan untuk menolak HAM perempuan adalah argumentasi kodrat perempuan sebagai pilar keluarga. Namun menjadi pilar keluarga bukan berarti mengorbankan hak asasinya. Dalam suatu rumah tangga pada umumnya beberapa jenis kegiatan dilakukan laki-laki, dan beberapa dilakukan oleh

perempuan. Berbagai observasi, menunjukkan perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga. Sehingga bagi mereka yang bekerja, selain bekerja di tempat kerja juga masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. (Zaxshack, 2009, dalam Komnas Perempuan). Premis utama dari non diskriminasi adalah bahwa setiap individu tidak akan ditolak haknya atas dasar ras, etnik dan terutama jenis kelamin. Esensi dari HAM adalah untuk memberikan kapasitas melakukan pilihan yang bertanggungjawab.

- Praktik Reproduksi perempuan. CEDAW menjamin agar perempuan diberikan akses pada pelayanan kesehatan serta *family planning* termasuk di dalamnya aborsi. Penyunatan terhadap anak perempuan merupakan kekerasan terhadap perempuan.
- Partikularisme budaya. Kebijakan untuk menerapkan budaya-budaya tertentu dalam kehidupan masyarakat didasarkan oleh keyakinan-keyakinan agama yang merupakan kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar. Penerapan peraturan daerah yang didasarkan oleh partikularisme budaya tertentu (termasuk di dalamnya tradisi tertentu yang mengekang perempuan) tidak dapat dibenarkan. Pembatasan-pembatasan terhadap perempuan, seperti pelarangan menikah diluar yang seiman dan praktik poligami merupakan pelanggaran menurut CEDAW.
- Akses terhadap sumber daya produktif. CEDAW menjamin hak sosio-ekonomi perempuan (tanah, kredit usaha, dan sebagainya), dan juga memastikan peranan perempuan secara aktif menentukan pembangunan negaranya.
- Budak Seks. *trafficking* menjadi masalah yang besar di negara-negara, seperti Thailand, Burma dan Indonesia. Dalam kasus Indonesia, UU *Trafficking* belum ada.

Keterkaitan antara perempuan dengan kondisi kemiskinan, dimana budaya patriarki secara tidak langsung telah memberikan batasan-batasan bagi perempuan dan ketidakadilan serta ketidaksetaraan turut melahirkan kedekatan identitas perempuan dengan kemiskinan. Edriana Nurdin, 2006 dalam Komnas Perempuan (2010), mengemukakan bahwa pengalaman perempuan dan laki-laki berbeda terhadap kemiskinan, dan perempuan dibandingkan laki-laki jauh lebih tertinggal dalam mengakses sumber daya politik maupun ekonomi.

Apabila perempuan tidak dijadikan target sasaran pengentasan kemiskinan dan analisis gender tidak digunakan untuk melihat akar penyebab kemiskinan, maka program-program pengentasan kemiskinan tidak akan bisa menjangkau kebanyakan perempuan yang memiliki keterbatasan akses terhadap ruang publik. Sementara itu, jangkauan program yang tidak responsif gender sangat terbatas pada program-program yang terjadi di ruang publik.

Akibatnya persoalan yang terjadi di ruang privat seperti kekerasan terhadap perempuan, tidak menjadi sasaran program.

Riant Nugroho (2008) mengatakan bahwa ada tiga kategori kemiskinan yang menjadi pusat perhatian pekerjaan sosial, yaitu:

1. Kelompok yang paling miskin (*destitute*) atau yang sering didefinisikan sebagai fakir miskin. Kelompok ini secara absolut memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan (umumnya tidak memiliki sumber pendapatan sama sekali) serta tidak memiliki akses terhadap berbagai pelayanan sosial.
2. Kelompok miskin (*poor*). Kelompok ini memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan namun secara relatif memiliki akses terhadap pelayanan sosial dasar.
3. Kelompok rentan (*vulnerable group*). Kelompok ini dapat dikategorikan bebas dari kemiskinan, karena memiliki kehidupan yang relatif lebih baik ketimbang kelompok *destitute* maupun miskin. Namun sebenarnya kelompok yang sering disebut “*near poor*” (agak miskin) ini masih rentan terhadap berbagai perubahan sosial di sekitarnya. Mereka seringkali berpindah dari status “rentan” menjadi “miskin” dan bahkan “*destitute*” bila terjadi krisis ekonomi dan tidak mendapat pertolongan sosial.

Konvensi Tentang Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau *The Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). CEDAW telah berjasa untuk membawa perempuan dalam arena perbincangan hak. CEDAW menjadi alat untuk selalu menagih pemerintah berada dalam jalur HAM.

Konvensi CEDAW memberikan suatu kerangka kerja untuk megajukan isu-isu perempuan yang penting dengan dasar pengertiannya, yakni non diskriminasi. Substansi CEDAW didasarkan oleh tiga prinsip yang saling berhubungan:

- Prinsip kesetaraan
- Prinsip non diskriminasi
- Prinsip kewajiban negara (*state obligation*)

Pada poin terakhir negara harus memastikan realisasi hak-hak perempuan sehingga perempuan mempunyai akses atau kesempatan. Artinya negara tidak saja menjamin apa yang tertera dalam pasal-pasal CEDAW, akan tetapi mengimplementasikannya. Tidak saja memeberikan hak-hak *dejure* namun juga secara *defacto*.

Hampir disetiap akses kehidupan perempuan selalu terhimpit dengan kemiskinan, akses akses itu antara lain :

1. AKSES POLITIK PEREMPUAN

Tingkat keterwakilan perempuan dalam lembaga politik formal, baik ditingkat nasional maupun lokal, besar pengaruhnya terhadap kualitas hidup perempuan. Hal ini terjadi karena kualitas hidup perempuan tidak dapat dipisahkan dari kebijakan publik yang dibuat oleh lembaga-lembaga politik, apalagi mengingat kebijakan tersebut juga diikuti oleh alokasi anggaran untuk implementasinya. Dengan kurangnya kepekaan pemerintah terhadap persoalan gender, maka apabila perempuan tidak ikut serta menentukan kebijakan yang mengatur kebutuhan yang harus dipenuhi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraannya, sangat mungkin kebutuhan perempuan akan ditempatkan pada skala prioritas yang rendah.

2. AKSES PEREMPUAN TERHADAP PEKERJAAN

Dalam hal akses perempuan terhadap pasar tenaga kerja, ada kecenderungan bahwa perempuan yang memasuki pasar tenaga kerja jauh lebih kecil jumlahnya daripada laki-laki. Sementara itu bagi perempuan yang mencoba memasuki pasar tenaga kerja, ternyata juga memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk memperoleh pekerjaan dibanding dengan laki-laki.

Tingginya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses ke pasar tenaga kerja, disebabkan oleh beberapa hal:

- Ketika ingin bekerja diluar rumah, perempuan yang belum menikah pada umumnya harus mendapatkan izin dari orang tua, dan yang sudah menikah harus mendapatkan izin dari suami.
- Perempuan mempunyai beban ganda karena bekerja diluar rumah dan tetap harus bertanggungjawab melakukan pekerjaan rumah tangga sampai mengasuh anak.
- Pembagian peran berdasarkan gender yang menyebabkan perempuan diasosiasikan dengan kegiatan yang berada di lingkup domestik dan laki-laki dengan lingkup publik. Hal ini memperkecil akses perempuan terhadap pekerjaan yang biasanya diasosiasikan dengan ranah publik dan berada di sektor formal.

3. AKSES PEREMPUAN TERHADAP UPAH YANG SAMA

Selain menghadapi keterbatasan akses terhadap pasar tenaga kerja dan pekerjaan, perempuan juga menghadapi diskriminasi upah. Angka perbedaan upah yang diterima laki-

laki dan perempuan dapat dijumpai dalam data Susenas, Sakernas, maupun dari laporan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikeluarkan oleh BAPPENAS, BPS, maupun UNDP.

Kebijakan pengupahan yang diskriminatif terhadap perempuan, juga merupakan akibat dari UU perkawinan tahun 1974, yang dalam pasal 1 secara eksplisit menyatakan bahwa laki-laki adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Pernyataan tersebut sangat berdampak pada kehidupan perempuan, karena UU tersebut dijadikan rujukan bagi setiap kebijakan publik yang timbul kemudian hari. Contohnya, laki-laki yang dinyatakan sebagai kepala keluarga mendapatkan tunjangan untuk anak dan istri dari tempat kerjanya, sedangkan perempuan yang dianggap sebagai pekerja pencari nafkah tambahan selalu dianggap sebagai pekerja lajang yang tidak mendapatkan tunjangan keluarga.

4. AKSES PEREMPUAN TERHADAP ASET PRODUKTIF

Aset produktif berupa tanah, rumah dan aset produktif lainnya sebagian besar dikuasai oleh laki-laki. Keterbatasan akses perempuan terhadap sumber produksi atau aset produktif seperti tanah atau rumah misalnya, juga menentukan ada tidaknya akses perempuan ke modal atau kredit. Karena aset produktif dikuasai oleh laki-laki. Apabila perempuan ingin melakukan kegiatan ekonomi berkaitan dengan aset tersebut, harus mendapat izin dari suaminya terlebih dahulu. Hal ini berkaitan dengan pengambilan keputusan atau kontrol produksi yang didominasi oleh laki-laki. Dengan keterbatasan penguasaan aset produksi, maka perempuan juga sangat terbatas aksesnya ke kredit (karena tidak memiliki jaminan) sehingga ini berakibat pada keterbatasan perempuan dalam mengembangkan usahanya.

5. AKSES PEREMPUAN TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM

Banyak perempuan (terutama di pedesaan) yang tidak memiliki aset produksi dan keterampilan untuk bekerja di sektor formal akhirnya harus mangadu nasib ke sektor informal, antara lain dengan menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW). TKW adalah salah satu contoh bagaimana perempuan miskin bekerja di sektor yang bersifat informal, seperti Pembantu Rumah Tangga (PRT), sulit mendapatkan akses terhadap perlindungan hukum yang memadai. Justru di era otonomi daerah, bukan malah TKW mendapatkan perlindungan

secara hukum, malah Pemerintah Daerah (Pemda) berlomba menarik retribusi dari para TKW.

6. AKSES PEREMPUAN TERHADAP LAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI

Selama lebih dari 30 tahun, Indonesia tidak melakukan upaya nyata untuk mengatasi terjadinya kematian ibu ketika melahirkan, yang angkanya jauh diatas negara-negara Asia, bahkan merupakan rekor tertinggi di Asean, dimana angka kematian ibu yang melahirkan tetap diatas rasio 300/100.000 kelahiran.

Hal tersebut terjadi dikarenakan beberapa faktor yang saling berkaitan, mulai dari masalah diskriminasi gender yang sangat mengakar pada budaya, interpretasi agama, juga masalah lemahnya koordinasi antar sektor pemerintah terkait dalam menanggulangi masalah tersebut. Disamping terdapat mitos-mitos seputar peran perempuan pada umumnya dan peran ibu melahirkan pada khususnya, masalah gizi buruk yang dialami oleh perempuan akibat budaya makan yang mendahulukan laki-laki menjadi kendala besar dalam upaya penurunan angka kematian ibu ketika melahirkan. Kendala lain berupa keterbatasan dana untuk melahirkan di rumah sakit, dan di daerah-daerah terpencil juga banyak keterbatasan tenaga bidan untuk membantu masalah kelahiran.

7. AKSES PEREMPUAN TERHADAP LAYANAN PENDIDIKAN

Indonesia termasuk negara yang cukup baik dalam menyediakan akses terhadap pendidikan dasar. Tingkat partisipasi pendidikan dasar mencapai lebih dari 97% baik untuk laki-laki maupun perempuan. Tapi sayangnya akses terhadap pendidikan ini semakin berkurang untuk tingkat pendidikan lanjutan.

Menurut data yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, ada berbagai alasan mengapa anak perempuan tidak menamatkan sekolahnya atau tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Salah satu alasan tersebut adalah adanya hambatan kultural, yaitu masih kuatnya budaya kawin muda bagi perempuan yang tinggal di daerah pedesaan. Anggapan yang berlaku adalah bahwa setinggi-tingginya perempuan sekolah, akhirnya tidak akan bekerja karena perempuan harus bertanggungjawab terhadap pekerjaan rumah tangga. Hal yang paling dominan adalah hambatan ekonomi, yaitu keterbatasan biaya

untuk sekolah sehingga keluarga miskin terpaksa menyekolahkan anak laki-laki ketimbang anak perempuan.

8. MINIMNYA ALOKASI ANGGARAN PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEREMPUAN

Pada dasarnya, setiap daerah sudah mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan perempuan dalam APBD, walau ada yang eksplisit dan ada yang tidak eksplisit. Jumlah APBD yang diperuntukkan bagi pemberdayaan perempuan di setiap daerah beragam. Pada umumnya alokasi anggaran tersebut adalah untuk membiayai organisasi PKK.

9. BEBAN KERJA PEREMPUAN TINGGI

Alokasi atau jam kerja perempuan lebih panjang dibandingkan laki-laki, tapi secara ekonomi penghasilan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Hal ini terjadi karena perempuan bertanggungjawab pada pekerjaan produktif, reproduktif dan fungsi-fungsi kontrol sosial di komunitas. Perempuan selalu melakukan ketiga tanggungjawab tersebut secara bersamaan, sedangkan laki-laki hanya bertanggungjawab pada pekerjaan produktif saja.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Bank Dunia di 12 lokasi, di beberapa lokasi khususnya di perdesaan menyatakan bahwa perempuan mempunyai beban kerja yang lebih berat daripada laki – laki. Mereka melakukan pekerjaan rumah tangga, merawat anak, merawat keluarga yang sakit, dan merawat orang tua. Mengingat jumlah perempuan miskin merupakan jumlah yang terbesar dari jumlah seluruh penduduk dan pada umumnya perempuan lebih disiplin serta lebih berhasil dalam mengelola usaha mikro, maka hal ini merupakan nilai positif dalam pemberdayaan perempuan. Namun masih perlu untuk pemerangi beban kerja ganda yang ditanggungnya dan perlunya meningkatkan kesetaraan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat keluarga, komunitas dan kebijakan publik.

Banyak perempuan yang berpendidikan setara dengan laki-laki, tapi harus merelakan kehilangan kesempatan bekerja karena harus bertanggungjawab pada pekerjaan domestik. Kenyataan memperlihatkan bahwa masih ada nilai-nilai masyarakat yang membatasi ruang gerak terutama perempuan dalam kehidupan. Sebagai contoh apabila seorang isteri yang hendak mengikuti tugas belajar, atau hendak berpergian ke luar negeri harus mendapat izin suami, tetapi kalau suami yang akan pergi tidak perlu izin dari isteri.

Program penanggulangan kemiskinan seharusnya memuat strategi dan langkah-langkah untuk secara signifikan mengurangi jumlah perempuan miskin. Langkah awal dimulai dari analisis kemiskinan dengan perspektif gender, lalu diikuti dengan diagnosis kemiskinan berdasarkan perspektif gender, dan pengkajian ulang kebijakan serta strategi kebijakan yang responsif gender.

Penggunaan analisis gender dalam program pengentasan kemiskinan akan membantu mengidentifikasi ketimpangan gender sebagai aspek yang penting dari kemiskinan. Dengan memetakan hubungan antara ketidakadilan gender dan kemiskinan kaum perempuan, program pengentasan kemiskinan akan dapat mengusulkan solusi untuk menentukan angka kemiskinan masyarakat pada umumnya dan kaum perempuan pada khususnya.

Beberapa studi dilakukan untuk membahas bagaimana program pembangunan telah meminggirkan sekaligus memiskinkan perempuan (Shiva, 1997; Mosse, 1996), http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/mu_pengetahuan_teknologi_dan_kemiskinan.pdf

Seperti Program revolusi hijau yang memiskinkan perempuan dari pekerjaan di sawah yang menggunakan ani-ani. Di Jawa misalnya revolusi hijau memperkenalkan jenis padi unggul yang panennya menggunakan sabit.

Indikator ketidakadilan yang berbasiskan pada ketimpangan gender dan mengakibatkan kemiskinan perempuan (Noerdin, 2006 dalam Iwan,2010) antara lain:

1. Perempuan bukan sebagai pengambil keputusan dalam keluarga, masyarakat maupun negara.
2. Perempuan seringkali terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan pertanian yang tidak dibayar atau dibayar rendah.
3. Perempuan kurang memiliki akses terhadap pendidikan dan pelatihan.
4. Perempuan mendapatkan gaji yang berbeda untuk jenis pekerjaan yang sama.
5. Perempuan kekurangan modal untuk untuk membangun usaha sendiri
6. Perempuan tidak punya hak atas tanah yang ditinggalinya, karena tanah dan aset lainnya atas nama suami, bapak, saudara laki-laki atau kakek.
7. Perempuan lebih rendah pendidikannya daripada laki-laki karena asumsi bahwa perempuan setelah menikah akan menjadi ibu rumah tangga sehingga investasi untuk sekolah pada perempuan dianggap tidak menguntungkan.

8. Kesehatan reproduksi perempuan belum dijadikan prioritas dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Anggaran pemerintah bagi kesehatan dasar untuk Posyandu dan Puskesmas masih sangat rendah. Dengan keterbatasan Posyandu dan Puskesmas maka perempuan miskin yang butuh pelayanan kesehatan reproduksi akan sulit untuk menjangkaunya.
9. Perempuan selalu menjadi objek dari hubungan seksual yang tidak aman karena kontrol perilaku seksual ada di pihak laki-laki, sehingga perempuan sangat rentan terhadap penularan HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya. Hal ini berdampak pada penurunan kualitas dan produktifitas hidup perempuan.
10. Perempuan lebih banyak melakukan pekerjaan domestik dan tidak dibayar sehingga jam kerja perempuan lebih tinggi daripada laki-laki, sementara penghasilan perempuan jauh lebih rendah dibanding laki-laki.
11. Perempuan selalu dibayangi rasa takut apabila terjadi konflik dalam rumah tangga karena selalu berada dalam kondisi yang lemah dan rentan terhadap perlakuan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini berhubungan dengan rendahnya posisi tawar perempuan dibandingkan dengan laki-laki dalam keluarga.
12. Perempuan sangat rentan dalam situasi konflik. Perempuan biasanya menjadi target perlakuan kekerasan dalam situasi konflik. Berbagai bentuk tidak kekerasan terhadap perempuan sebagai akibat perbedaan, muncul dalam berbagai bentuk. Kata kekerasan merupakan terjemahan dari violence, artinya suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Oleh karena itu kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik saja seperti perkosaan, pemukulan dan penyiksaan, tetapi juga yang bersifat non fisik, seperti pelecehan seksual sehingga secara emosional terusik. Pelaku kekerasan bermacam-macam, ada yang bersifat individu, baik di dalam rumah tangga sendiri maupun di tempat umum, ada juga di dalam masyarakat itu sendiri. Bagi perempuan yang bekerja di luar rumah, seperti pasar, akan kehilangan sumber ekonominya karena mereka takut akan keluar rumah.
13. Perempuan janda yang dengan terpaksa menjadi kepala keluarga tetap tidak dianggap sebagai pencari nafkah utama keluarga, sehingga upahnya jauh lebih

rendah dari laki-laki, sementara jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga setiap tahunnya selalu bertambah.

Akomodasi kebutuhan riil perempuan sering dipahami hanya sebatas kebutuhan rumah tangga/keluarga, kesehatan termasuk gizi, pendidikan dan ekonomi. Akibatnya banyak institusi perempuan seperti PKK, Dharmawanita, program P2WKSS yang dimaksudkan untuk memberdayakan perempuan justru menimbulkan persoalan baru bagi perempuan, yaitu beban ganda perempuan. Di satu sisi perempuan didorong untuk aktif dalam berbagai aktifitas, tetapi di sisi lain peran tradisional sebagai istri dan ibu tetap dibebankan kepadanya. Akibat lebih jauh adalah terjadinya subordinasi, marginalisasi, diskriminasi dan eksploitasi bahkan kekerasan terhadap perempuan.

B. PENUTUP

Ketertinggalan kaum perempuan dari laki-laki yang berujung pada ketidakadilan gender antara lain dapat berawal dari konstruksi patriarki masyarakat yang sudah membudaya, depolitisasi kepentingan negara yang terwujud pada sistem negara yang tidak adil terhadap kepentingan kaum perempuan, interpretasi agama yang tidak benar dan kurangnya akses perempuan dalam berbagai kesempatan.

Akomodasi kebutuhan riil perempuan sering dipahami hanya sebatas kebutuhan rumah tangga/keluarga, kesehatan termasuk gizi, pendidikan dan ekonomi. Akibatnya banyak institusi perempuan seperti PKK, Dharmawanita, program P2WKSS yang dimaksudkan untuk memberdayakan perempuan justru menimbulkan persoalan baru bagi perempuan, yaitu beban ganda perempuan. Di satu sisi perempuan didorong untuk aktif dalam berbagai aktifitas, tetapi di sisi lain peran tradisional sebagai istri dan ibu tetap dibebankan kepadanya. Akibat lebih jauh adalah terjadinya subordinasi, marginalisasi, diskriminasi dan eksploitasi bahkan kekerasan terhadap perempuan.

Pemberdayaan ekonomi perempuan keberadaannya adalah untuk mempertahankan sistem kapitalisme yang saat ini mengalami krisis. Sistem yang menjadikan ekonomi sebagai penggerak utama pemberdayaan perempuan, sementara kampanye kesetaraan gender hanyalah pemanis untuk memoles program kapitalistik ini agar nampak memihak perempuan.

Kebanyakan kebijakan ekonomi diformulasikan dan diimplementasikan dengan cara yang dianggap tampak netral gender. Namun ketika ditelaah lebih dekat, sesungguhnya hal

tersebut ditandai oleh banyaknya bias gender (Elson 1993 dalam Nugroho, 2008). Berdasarkan kenyataan tersebut maka perlu ada perubahan atau perbaikan terhadap ilmu ekonomi dan setiap kebijakan pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Tanpa usaha penghapusan diskriminasi gender berbagai langkah dan upaya pengentasan kemiskinan tidak akan berjalan optimal. Program pengentasan kemiskinan seharusnya memuat strategi dan langkah-langkah yang secara signifikan mengurangi jumlah perempuan miskin. Kesetaraan gender dan kesehatan reproduksi merupakan hal yang mutlak. Untuk itu setiap pemegang kepentingan harus berkomitmen membebaskan perempuan dari diskriminasi, kekerasan dan buruknya kondisi kesehatan yang dihadapi kaum perempuan setiap harinya. Ketidaksetaraan merupakan inefisiensi secara ekonomi, selain juga pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan membahayakan kesehatan.

Upaya penghapusan kemiskinan tidak akan berhasil dengan maksimal apabila perempuan belum bisa menikmati hak-hak sosial, budaya, ekonomi, dan politik secara penuh. Untuk itu, diperlukan tiga intervensi strategis, yaitu pendidikan, kesehatan reproduksi dan kesempatan ekonomi bagi perempuan serta yang tak kalah pentingnya adalah penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Ada beberapa argumentasi yang dikemukakan untuk mendukung pentingnya fokus terhadap masalah gender dalam kemiskinan : Perempuan lebih miskin dan terdeprivasi dibanding laki-laki. Oleh karena itu diperlukan suatu fokus gender untuk alasan keadilan (gender equity). Menyatakan bahwa walaupun perempuan sama miskinnya dengan laki-laki, sehingga tidak perlu ada perlakuan khusus maka investasi pada sektor sosial yang diarahkan kepada perempuan dapat dibenarkan jika tingkat pengembalian sosial dari investasi itu lebih tinggi jika diberikan kepada laki-laki. Ketika perempuan diizinkan bekerja di profesi yang mereka inginkan, ketika mereka memiliki akses terhadap jasa keuangan, dan ketika mereka dilindungi oleh hukum dari kekerasan rumah tangga, mereka bukan saja lebih berdaya secara ekonomi melainkan juga berumur panjang.

Kemiskinan perempuan, masih terjadi karena kebijakan pembangunan dan reformasi ekonomi yang selama ini telah dilakukan kurang peka terhadap masalah kemiskinan. Berkaitan dengan kemiskinan perempuan banyak aspek yang berkaitan dengan keadilan gender akan mempengaruhi perbedaan dalam dimensi kemiskinan, intervensi pemerintah yang memajukan keadilan gender menjadi sangat penting, dalam penyusunan strategi dan aksi untuk mencapai tujuan kebijakan pengentasan kemiskinan. Perhatian terhadap masalah

keadilan gender bukan hanya karena alasan keadilan (equity), tetapi juga karena alasan efisiensi. Perlunya suatu integrasi keadilan gender dalam kebijakan pembangunan dan pengentasan kemiskinan menjadi syarat mutlak untuk mencapai target pengentasan kemiskinan. (Iwan Mulyawan, M.Sc, 2010)

Perang melawan kemiskinan dan kesetaraan gender sangat penting, Inilah sebabnya mengapa Bank Duni bekerja dengan banyak Negara untuk menghadapi tantangan berbasis gender. Para pembuat kebijakan dapat menggunakan berbagai bukti yang menunjukkan keuntungan ekonomidari kesetaraan dengan membersihkan sistem hokum mereka dari diskriminasi yang membuat perempuan tertahan. Indonesia saat ini membutuhkan visi politik baru pemberdayaan perempuan, visi yang mampu melindungi, mensejahterakan sekaligus mengangkat harkat perempuan.

Daftar Pustaka :

- Dikutip dari Pengantar Antropologi – Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Kemiskinan; 2009; http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/mkdu_isd/bab8-ilmu_pengetahuan_teknologi_dan_kemiskinan.pdf
- Mulyana, Iwan, 2010, *Gender dalam kemiskinan dan kebijakan Pembangunan*,
- Nugroho, Riant (2008), *Gender dan Strategi Pengarusutamaan Gender di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Komnas Perempuan, *Modul Pendidikan HAM Berperspektif Gender*, Jakarta, 2010